ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI GAJI (SIMGAJI) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

Nicho Kurniawan Santoso

Student Number : 19312151

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

LAPORAN MAGANG

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI GAJI (SIMGAJI) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

Dibuat oleh :

Nicho Kurniawan Santoso

Students Number : 19312151

Diperiksa oleh :

Dosen Pembimbing

Yuni Nustini, Dra.MAFIS., Ak., CA., Ph.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nicho Kurniawan Santoso
NIM	: 19312151
Fakultas	: Bisnis dan Ekonomika
Judul	: Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai melalui Aplikasi Sistem Informasi gaji (SIMGAJI) pada BPKAD Kabupaten Pati

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Blora, 13 Februari 2023

Nicho Kurniawan Santoso

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

TUGAS AKHIR BERJUDUL

Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Melalui Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) pada BPKAD Kabupaten Pati

Disusun Oleh : NICHO KURNIAWAN SANTOSO

Nomor Mahasiswa : 19312151

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: Senin, 13 Maret 2023

Penguji/ Pembimbing TA : Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D. .....

Penguji : Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv). .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR MAGANG

Bismillahirrahmannirrahim

Pada Semester Genap 2022/2023, hari, tanggal: Senin, 13 Maret 2023, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir Magang yang disusun oleh:

Nama	: NICHO KURNIAWAN SANTOSO
No. Mahasiswa	: 19312151
Tugas Akhir	: TA Magang
Judul Tugas Akhir	: Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Melalui Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) pada BPKAD Kabupaten Pati
Pembimbing	: Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir Magang tersebut dinyatakan:

1. **Lulus Ujian Tugas Akhir *)**
   a. Tugas Akhir tidak direvisi
   ~~b. Tugas Akhir perlu direvisi~~
2. ~~**Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir**~~

Nilai	: A
Referensi	: Layak /~~Tidak Layak~~ *) ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji

Ketua Tim	: Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv).	.....
Anggota Tim	: Yuni Nustini, Dra. MAFIS., Ak., CA., Ph.D.	.....

Yogyakarta, Senin, 13 Maret 2023
Ketua Program Studi Akuntansi

Rifqi Muhammad S.E., M.Sc., Ph.D..

Keterangan:
**) Coret yang tidak perlu*
- Bagi yang lulus Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif, segera konfirmasi ke Divisi Akademik

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG

Dengan ini, Dosen Pembimbing dan supervisor menyatakan bahwa laporan magang yang disusun oleh:

Nama : Nicho Kurniawan Santoso

NIM : 19312151

Prodi : Akuntansi

Judul : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI GAJI (SIMGAJI) PADA BPKAD KABUPATEN PATI

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, pada tanggal yang tertera di bawah ini

Disetujui Oleh :

Pati, 2 Januari 2023

Dosen Pembimbing	Supervisor
Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D	Poppy Wijayanti ,SE.MM.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat dan anugerah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan laporan tengah magang ini sebagai bentuk laporan aktivitas saya selama magang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Penulisan laporan tengah magang ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan tengah magang ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yuni Nustini, Dra., MAFIS, Ph.D., Ak selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahlan saya dalam penyusunan laporan tengah magang ini;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Kedua orang tua saya, Siswanto dan Sri Wahyuni yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan mendoakan penulis tiada henti;
4. Khusna Mafaza yang selalu memberikan dukungan dan doa selama penulis Menyusun laporan tengah magang ini .
5. Muhammad Alfian , Fadhlan Tinedy , Daffa Aldiansyah , Daffa Esyalaffi , Daffa Yurinda , Adira Nisrina , Lala Nabila , Aulivi Permata dan teman-teman lain yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam penyusunan laporan tengah magang ini.
6. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu atas bantuannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan tengah magang ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan tengah magang ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 3
1.4 Manfaat 3
BAB II KAJIAN PUSTAKA 5
2.1 Pajak 5
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 5
2.3 Sistem Informasi Manajemen (SIM) 6
2.4 Simgaji Taspen 7
2.5 Kajian Pajak Penghasilan Pasal 21 8
BAB III METODE PENELITIAN 10
3.1 Jenis Penelitian 10
3.2 Sumber dan Data Penelitian 10
3.4 Teknik Pengumpulan Data 11
3.5 Teknk Analisis Data 11
BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG 12
4.1 Profil Tempat Magang 12
4.2Aktivitas Magang 13
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 19
5.1 Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghsilan Pasal 21 Atas gaji Pegawai Melalui Aplikasi SIMGAJI 19
5.2 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai pada BPKAD Kabupaten Pati Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku 22
5.3 Peran SIMGAJI untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Pati 23
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 24
6.1 Kesimpulan 24
6.2 Saran 24

DAFTAR PUSTAKA 25
LAMPIRAN 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Sehingga pajak memiliki peran yang cukup penting bagi kemakmuran negara. Pendapatan dari pajak akan digunakan untuk mewujudkan tujuan bangsa. Peranan pajak yang begitu penting mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan membuat beberapa aturan mengenai pajak. Untuk itu semua elemen yang ada negara ini harus memenuhi kewajiban pajaknya. Ditinjau dari Lembaga pemungutannya terdapat 2 jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat (KKR Indonesia , 2009), dengan begitu pemerintah pusat lah yang dapat menggunakan pendapatan pajak itu.

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan salah satu contoh pajak pusat dimana PPh 21 adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Penghasilan yang bersangkutan adalah gaji, upah, biaya dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan Wajib Pajak Swasta dalam Negeri. Undang-undang yang mengatur besaran tarif pajak, tata cara pembayaran, dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan tambahan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diterbitkan mulai 1 Januari 2009.

Apabila pengelolaan Pajak penghasilan pasal 21 dikelola dengan baik mempermudah pemerintah daerah untuk mensukseskan pembangunan nasional .Menurut (Tumanggor 2021) Kegiatan yang berkesinambungan merupakan salah satu ciri pembangunan nasional yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu sumber dana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Sehingga peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak sebagai salah satu sumber dana

sangat diperlukan. Dengan begitu diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki inovasi untuk mempermudah tugas mereka.

Teknologi sering menjadi salah satu inovasi yang efektif untuk mempermudah tugas. Menurut Arumawati, dan Mildawati (2021) Pada era sekarang teknologi sangat dibutuhkan oleh manusia, karena itulah saat ini teknologi telah menjadi kebutuhan dasar setiap individu. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Pati telah bekerja sama dengan PT Taspen (Persero) agar dapat menggunakan Aplikasi SIMGAJI yang digunakan untuk mengelola penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dengan adanya aplikasi SIMGAJI diharapkan dapat mempermudah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati dalam menyelesaikan tugas dari Pemerintah Pusat. Salah satu tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ialah Pengelolaan PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 mengatur tentang PPh menyebutkan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. oleh karena itu PNS akan menerima penghasilan atau gaji utuh, karena pajak penghasilan dari PNS dibayarkan oleh pemerintah dan dipotong langsung oleh bendahara. Adanya hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui peran SIMGAJI pada BPKAD kabupaten PATI dalam perhitungan dan Pemungutan PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati dengan menggunakan Sistem informasi gaji (SIMGAJI)?
2. Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku?

3. Apakah penerapan SIMGAJI dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Pati ?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis penerapan aplikasi SIMGAJI atas prosedur perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Penggajian pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan SIMGAJI dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola penggajian PNS di Kabupaten Pati.

1.4 Manfaat

1. **Bagi Penulis**
   a. Memberikan pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja yang sebenarnya
   b. Melatih kedisiplinan diri, mental, maupun rasa percaya diri dalam mempersiapkan duna kerja yang sebenarnya
   c. Meningkatkan pengetahuan mengenai Penggajian Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di BPKAD Kabupaten Pati
   d. Mengetahui prosedur pemotongan dan perhitungan PPh pasal 21 dengan memanfaatkan SIMGAJI
2. **Bagi Instansi**
   a. Meningkatkan pelayanan kepada Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait proses penggajian mereka
   b. Membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi instansi secara maksimal dalam kegiatan operasionalnya.

c. Memungkinkan untuk terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan perguruan tinggi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sedangkan Menurut (Sutedi 2022,hal 2) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah diatur didalam undang-undang, sehingga memiliki sifat yang memaksa dan tidak terdapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh otoritas berdasarkan norma-norma hukum yang berfungsi menutup biaya yang telah dikeluarkan untuk kesejahteraan Bersama.

Pajak Memiliki dua fungsi menurut (Yulianawati 2011) yaitu fungsi Budgeter dan Reguler. Fungsi budgeter berarti pajak digunakan sebagai sumber dana oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya sehingga pajak dimasukan ke dalam APBN sebagai penerimaan negara. Sedangkan Fungsi Reguler , pajak digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh penekanan pajak pada minuman keras dan barang mewah agar dikenakan pajak yang lebih besar.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang didapatkan dari gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan lain yang menghasilkan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Bonifasius dan Agnes, 2022). Undang Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan digunakan sebagai alat untuk mewujudkan sistem perpajakan

yang optimal. Dengan adanya UU tersebut diharpak sistem perpajakan menjadi lebih netral, stabil, adil, sederhana, dan jelas hukumnya serta trasnparan.

Menurut PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 5 Ayat 1 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2.3 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen memiliki peran yang cukup penting dalam keberhasilan suatu organisasi di era sekarang. Sebab SIM merupakan sistem yang didesign agar dapat memberikan informasi sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan pada kegiatan organisasi. Para ahli memliki pengertian yang berbeda beda terhadap Sisem Iinformasi Manajemen diantaranya (Ajie,1996 hal 2):

1. Menurut Kronke dan David (1989), Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang dikembangkan sehingga dapat menyediakan informasi yang efektif dalam organisasi.
2. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menampilkan informasi untuk pengguna. Informasi tersebut dapat ditampilkan dengan lengkap walaupun informasi tersebut berasal dari masa lalu dan dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan dan berbentuk periodik . Sehingga dapat digunakan oleh pengguna dalam mengambil keputusuan. (Mc.Leod , 1995)
3. Sedangkan menurut Stoner (1996) SIM didefinisikan sebagai prosedur yang formal yang menampilkan informasi yang akurat diwaktu yang tepat kepada pengguna untuk pengambilan keputusan sehingga fungsi perencanaan , operasi yang efektif dan pengendalian dapat tercapai.

2.4 Simgaji Taspen

SIMGAJI merupakan aplikasi yang dibuat oleh PT Taspen yang berfungsi untuk mengelola data gaji ASN dan Non ASN yang berada di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Simgaji Taspen mempermudah semua urusan terkait penggajian pegawai di Kabupaten Pati antara lain :

1. Simgaji Taspen mudah untuk dioperasikan dan mudah dipahami karena ada tata cara/petunjuk penggunaannya (manual book Simgaji Taspen)
2. Simgaji Taspen selalu berinovasi dan selalu mengikuti perkembangan aturan terkait penggajian (update)
3. Simgaji Taspen selalu bisa menemukan solusi atas segala permasalahan terkait penggajian PNS
4. Simgaji Taspen merupakan aplikasi yang bisa diintegrasikan dengan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan Pemkab

2.5 Kajian Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Penulis	Obyek	Temuan
1	Dinda Fatma Azhara (2021)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang	Dalam penerapannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang telah meIakukan perhitungan Pajak PenghasiIan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen Pajak Terbaru PER-31/PJ/2012).
2	Yeremia Gosal, Herman Karamoy dan, Jessy Warongan (2017)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak orang pribadi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kota Manado belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 karena jumlah yang diinput mengalami kelebihan angka yang dapat menyebabkan PPh 21 terutang bertambah
3	Reza Arya Pratama (2021)	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perhitungan, pemotongan serta pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kata Kunci: Perhitungan PPh Pasal 21, Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21
4	Renald Runtuwarow dan Inggriani Elim (2016)	Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh. pasal 21 pada gaji pegawai negeri sipil di dinas perkebunan provinsi sulawesi utara telah sesuai dengan perhitungan PPh. Pasal 21. Hasil yang didapatkan berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dengan perhitungan penulis diperoleh perhitungan PPh.
5	Lady M. Johannis , Jullie J.	Inspektorat Daerah Kabupaten	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang

No	Penulis	Obyek	Temuan
	Sondakh, danDhullo Afandi (2018)	Minahasa Selatan	dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PMK 262/PMK.03 Tahun 2010. Namun, PPh Pelaporan Pasal 21 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kurang memuaskan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 karena bendahara pengeluaran tidak melaporkan penutupan PPh Pasal 21
6	Siti Jamilatun dan Imar Halimah (2021)	Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan	Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan sudah memakai prosedur yang benar, karena perhitungan PPh Pasal 21 antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan dan Menurut undangundang perpajakan no. 36 Tahun 2008 perhitunganya sudah sama. dan Pelaporan atas PPh Pasal 21 ASN Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan aturan perundang undangan. No. 40/PMK.03/207.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peniliti ialah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Rohiyatun (2020) Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Walaupun penelitian yang menggunakan metode ini paling sederhana, namun peneliti harus mampu menganalisis secara kritis berbagai hal yang menjadi subyek penelitiannya berdasarkan data yang diperoleh baik dari pengamatan langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti berharap jenis penelitian ini dapat membantu untuk menggambarkan secara jelas kondisi yang sebenarnya terjadi**.**

3.2 Sumber dan Data Penelitian

Sumber dan data dalam penelitian ini didapatkan langsung dari BPKAD Kabupaten Pati, dengan sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Rohiyatun et al (2020) sumber data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer ialah data yang didapatkan dari sumbernya, sumber disini yang dimaksudkan adalah langsung dari BPKAD Kabupaten Pati. Dimana sumber data ini dianggap lebih akurat keberadaannya.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari BPKAD Kabupaten Pati dapat berupa kajian-kajian literatur yang dapat membantu penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian penulis melakukan observasi dan wawancara yang nantinya akan diolah dan dilakukan evaluasi terhadap data yang telah didapatkan, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik untuk mengumpulkan data melalui dialog atau tanya jawab langsung antara pewawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki informasi yang memadai dalam penelitian ini (Raco, 2018). Wawancara ini nantinya akan membantu peneliti mendapatkan sesuatu seperti pikiran maupun opini yang disampaikan oleh narasumber sehingga peneliti dapat menganalisis suatu kejadian secara kritis dan ilmiah.

2. Pengumpulan Dokumen Instansi

Menurut Rohiyatun et al (2020) pengumpulan data perusahaan merupakan teknik dalam pengumpulan data yang tepat, karena hal ini dilakukan dengan mengumpulan data-data yang berasal dari BPKAD Kabupaten Pati yang dianggap berkaitan dengan penelitian peneliti seperti profil perusahaan terkait.

3.5 Teknk Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Wiwin Yuliani (2018), Penelitian Deskriptif kualitatif harus memiliki proses yang dapat menjadi peristiwa penjelas sehingga peneliti mendapatkan penalaran yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses yang peneliti buat.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

4.1 Profil Tempat Magang

Badan pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pati dibangun tahun 2007 dan mulai beroperasi tanggal 3 Maret Tahun 2009.BPKAD Kabupaten Pati berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 pasal 29 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati.

Nama Instansi : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD)

Alamat : Jalan Dokter Setia Budi, Pati Kidul, Pati, Pati Wetan/Dosoman, Pati Wetan, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114

Telepon : (0295)381931

Website : https://bpkad.patikab.go.id/

Visi :

"Meningkatnya Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yangTransparan, Akuntabel, Efektif, Efisien dan Ekonomis."

Misi :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang amanah, profesional,berintegritas tinggi dan bertanggung jawab;
2. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan baik dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan;
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yangefektif, efisien dan ekonomis;
5. Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel.

4.2Aktivitas Magang

Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 12 September 2022 sampai pada tanggal 12 Desember 2022. Pada awalnya magang dilaksanakan 6 hari kerja, yaitu dari hari senin sampai sabtu yang kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022 magang dilaksanakan 5 hari kerja, dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai 14.00 WIB. Pada tanggal 12 September 2022 peserta magang diwajibkan untuk hadir di kantor magang yang berlokasi di Jl. Setyabudi No. 34 a pati, Jawa Tengah untuk mendapatkan pembekalan selama magang oleh Kepala Subbidang Belanja Aparatur yaitu Ibu Poppy Wijayanti ,SE.MM. Dimulai dari aturan berpakaian selama magang yatu peserta magang wajib untuk menggunakan Jas Almamter dan berpakaian sopan. Dalam pembekalan juga dijelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan magang, budaya organisasi, maupun beberapa gambaran dan tugas tugas magang di Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah di BPKAD Kabupaten Pati.

Pada bulan September yang merupakan bulan pertama pelaksanaan magang, peserta magang mendapatkan penjelasan yang lebih mendetail lagi mengenai tugas magang di Sub Bidang Perebendaharaan dan Kas Daerah oleh Kepala Sub Bidang. Selain itu, peserta magang diberikan waktu untuk berkeliling kantor ditemani oleh mahasiswa magang lain yang lebih dulu melaksanakan program magang di BPKAD. Untuk minggu pertama magang, Peserta magang diberi tugas untuk membantu menyusun arsip daftar gaji PNS dan menyusun arisp digital gaji se-Kab Pati. Disini Peserta magang harus menyusun berkas dengan rapi dan runtut untuk disimpan sebagai arsip kemudian arsip tersebut di scan agar bisa menjadi arsip digital. Selain melakukan arsip peserta magang diberikan tugas untuk melakukan Input Data perubahan Gaji PNS ke aplikasi SIMGAJI.Selama hampir satu bulan melaksanakan magang dan sudah mulai memahami setiap bagian bagian diinstansi, peserta magang tertarik untuk mengambil topik dengan judul '' **Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Melalui Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) pada BPKAD Kabupaten Pati**''.

Bulan kedua pelaksanaan magang yaitu bulan Oktober, di awal bulan ini peserta magang membantu terlaksanakannya konsep pembuatan SKPP bagi pegawai mutasi/ pensiun. Setelah itu SKPP yang sudah jadi disimpan untuk dijadikan arsip digital. Arsip dokumen ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan dokumen hilang selain itu juga memudahkan pengambilan dokumen dengan cepat apabila dokumen ini dibutuhkan. Selain berkontribusi dalam pembuatan SKPP peserta magang juga berkontribusi dalam penerbitan, pencetakan dan pendistribusian daftar gaji PNS. Tugas lain Peserta magang dibulan Oktober yaitu membuat rekap Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dimiliki Bupati , Anggota DPRD, PNSD, serta P3K.

Memasuki bulan November peserta magang diberi tugas untuk melakukan pemliharaan Biodata Pegawai yang terdiri dari PNSD,P3K,dan CPNS menggunakan SIMGAJI. Dalam kegiatan tersebut peserta magang difokuskan untuk mengkoreksi dan menginput ulang apabila terjadi kesalahan pada NPWP dan

alamat pegawai agar sesuai dengan Biodata yang mereka miliki. Selain itu peserta magang juga ditugaskan membuat rekap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada bulan ini.

Pada Bulan Desember yaitu bulan terakhir pelaksanaan magang tugas peserta magamng masih sama yaitu melakukan pemliharaan Bio data Pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI. Tetapi pada bulan tersebut peserta magang difokuskan untuk mengkoreksi Biodata anggota keluarga pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI.

No	Waktu Pelaksanaan	Permasalahan	Kegiatan	Hasil
1	12-18 September 2022	• Belum mengetahui peraturan selama magang dan cara untuk membuat arsip digital	• Pembekalan pedoman berpakaian dan teknis selama magang • Menyusun arsip daftar gaji PNS dan menyusun arisp digital gaji se-Kab Pati	• Mengetahui peraturan selama magang yang harus saya taati • Peserta magang mengetahui cara untuk membuat arsip digital
2	19-25 September 2022	• Belum paham mengenai cara kerja SIMGAJI	• Melakukan arsip peserta magang diberikan tugas untuk melakukan Input Data perubahan Gaji PNS ke aplikasi SIMGAJI	• mengetahui prosesdan perhitungan gaji PNS
3	26 September – 2 Oktober 2022	• Belum mengetahui mekanisme dalam penyusunan gaji	• Melakukan arsip peserta magang diberikan tugas untuk melakukan Input Data perubahan Gaji PNS ke aplikasi SIMGAJI	• mengetahui prosesdan perhitungan gaji PNS • Mengetahui proses pembuatan SKPP beserta

No	Waktu Pelaksanaan	Permasalahan	Kegiatan	Hasil
			• Membantu terlaksanakannya pembuatan SKPP bagi pegawai mutasi/ pensiun • Membuat arsip digital SKPP yang telah dibuat	perhitungan gajinya
4	3-9 Oktober 2022	• Belum mengetahui perhitungan SKPP	• Membantu terlaksanakannya pembuatan SKPP bagi pegawai mutasi/ pensiun • Membuat arsip digital SKPP yang telah dibuat	• Mengetahui proses pembuatan SKPP beserta perhitungan gajinya
5	10-16 Oktober 2022	• Tidak paham mengenai cara membuat arsip digital dengan baik	• Membuat arsip digital SKPP pada 2021 yang belum sempat diarsipkan	• Mengetahui Pentingnya arsip digital dalam sebuah organisasi dan instansi
6	17-23 Oktober 2022	• Tidak paham mengenai cara membuat arsip digital dengan baik	• Membuat arsip digital SKPP pada 2021 yang belum sempat diarsipkan	• Mengetahui Pentingnya arsip digital dalam sebuah organisasi dan instansi
7	24-30 Oktober 2022	• Tidak paham mengenai cara membuat arsip digital dengan baik • Belum mengetahui apa itu JKK dan JKM	• Membuat arsip digital SKPP pada 2021 yang belum sempat diarsipkan • Membuat rekap Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dimiliki Bupati , Anggota DPRD, PNSD, serta P3K.	• Mengetahui Pentingnya arsip digital dalam sebuah organisasi dan instansi -

No	Waktu Pelaksanaan	Permasalahan	Kegiatan	Hasil
8	31 Oktober-6 November 2022	• Belum mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata pegawai	• Membuat arsip digital SKPP pada 2021 yang belum sempat diarsipkan • Melakukan pemliharaan Biodata Pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI	• Mengetahui Pentingnya arsip digital dalam sebuah organisasi dan instansi
9	7-12 November 2022	• Belum mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata pegawai	• Melakukan pemliharaan Biodata Pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI	• Mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata agar data yang digunakan tetap akurat
10	13-19 November 2022	• • Belum mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata pegawai	• Melakukan pemliharaan Biodata Pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI • Membuat arsip digital SKPP dengan TMT bulan November	• Mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata agar data yang digunakan tetap akurat
11	20-26 November 2022	• Belum mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata pegawai	• Melakukan pemliharaan Biodata Pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI	• Mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata agar data yang digunakan tetap akurat
12	27 Nov-3 Des 2022	• Belum mengetahui	• Melakukan pemliharaan	• Mengetahui pentingnya

No	Waktu Pelaksanaan	Permasalahan	Kegiatan	Hasil
		pentingnya pemeliharaan biodata pegawai	Biodata Pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI	pemeliharaan biodata agar data yang digunakan tetap akurat
13	4-12 Desember 2022	• Belum mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata pegawai	• Melakukan pemliharaan Biodata Pegawai yang terdiri dari PNSD, P3K, dan CPNS menggunakan SIMGAJI	• Mengetahui pentingnya pemeliharaan biodata agar data yang digunakan tetap akurat

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghsilan Pasal 21 Atas gaji Pegawai Melalui Aplikasi SIMGAJI

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki beberapa potongan setiap bulannya. Dimana ptongan tersebut secara otomatis akan mengurangi penghasilan dari mereka. Salah satu tujuannya yaitu untuk memenuhi iuran yang harus mereka bayarkan. Untuk memudahkan mengelola penggajian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten pati menggunakan Aplikasi SIMGAJI . Dengan Simulasi perhitungan gaji sebagai berikut:

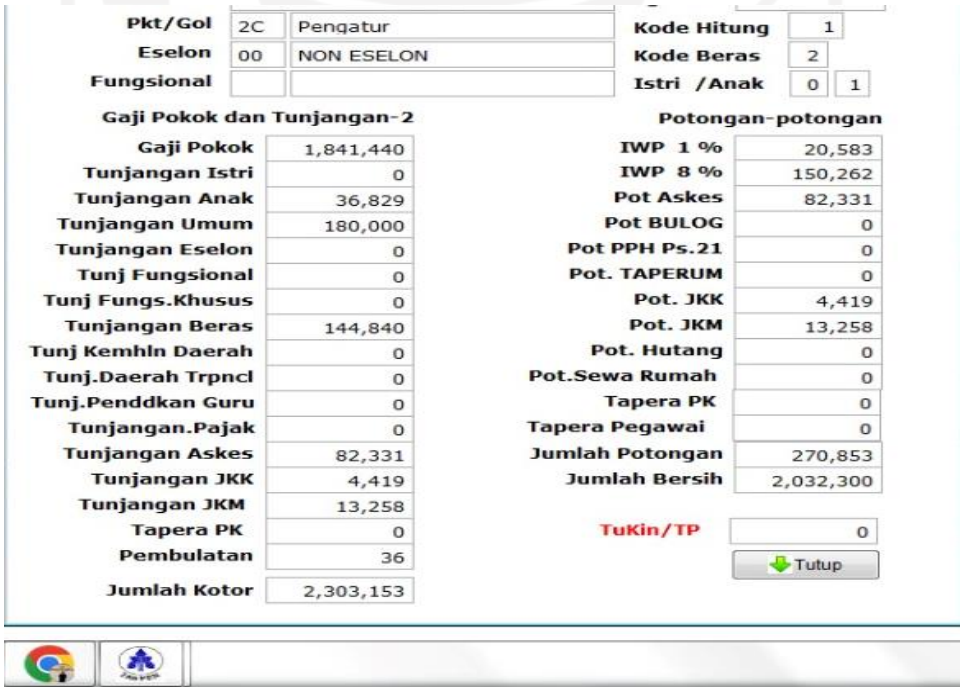

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa gaji Pegawai setiap bulannya memiliki beberapa potongan dan tunjangan . Dengan adanya tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan kesejahteraan pegawai akan meningkat Untuk tunjangan pajak digunakan untuk menganti potongan pajak yang

dikenakan sebab PPh pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditanggung oleh pemerintah dan dipotong langsung oleh bendahara. SIMGAJI memiliki fitur yang dapat digunakan untuk mengelola PPh pasal 21 untuk pegawai dengan simulasi pajak sebagai berikut :

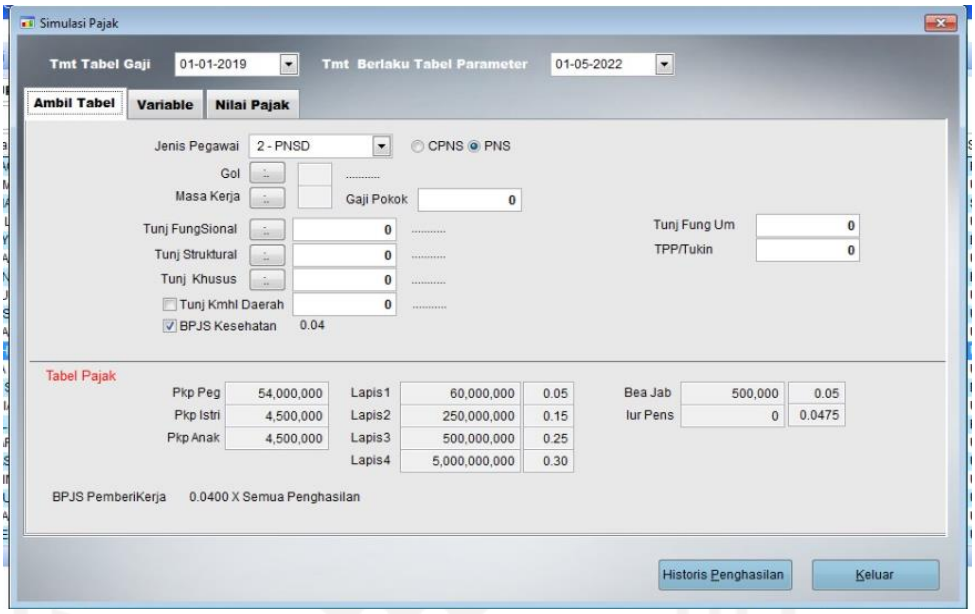

Pada Simulasi perhitungan pajak pada SIMGAJI telah sesuai dengan Undang undang Harmonisasi Peraturan perpajakan dimana tarif progresif yang digunakan telah sesuai yaitu :

- Lapis 1 (5%) = PKP ≤ Rp 60.000.000
- Lapis 2 (15%) = Rp 60.000.000 < PKP≤ Rp 250.000.000
- Lapis 3 (25%) = Rp 250.000.000 < PKP≤ Rp 500.000.000
- Lapis 4 (30%)= Rp 500.000.000 < PKP≤ Rp 5.000.000.000
- Lapis 5 (35%) = PKP ≤Rp 5.000.000.000

Selain itu biaya jabatan sebesar 5% pada simulasi pajak diatas juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008.

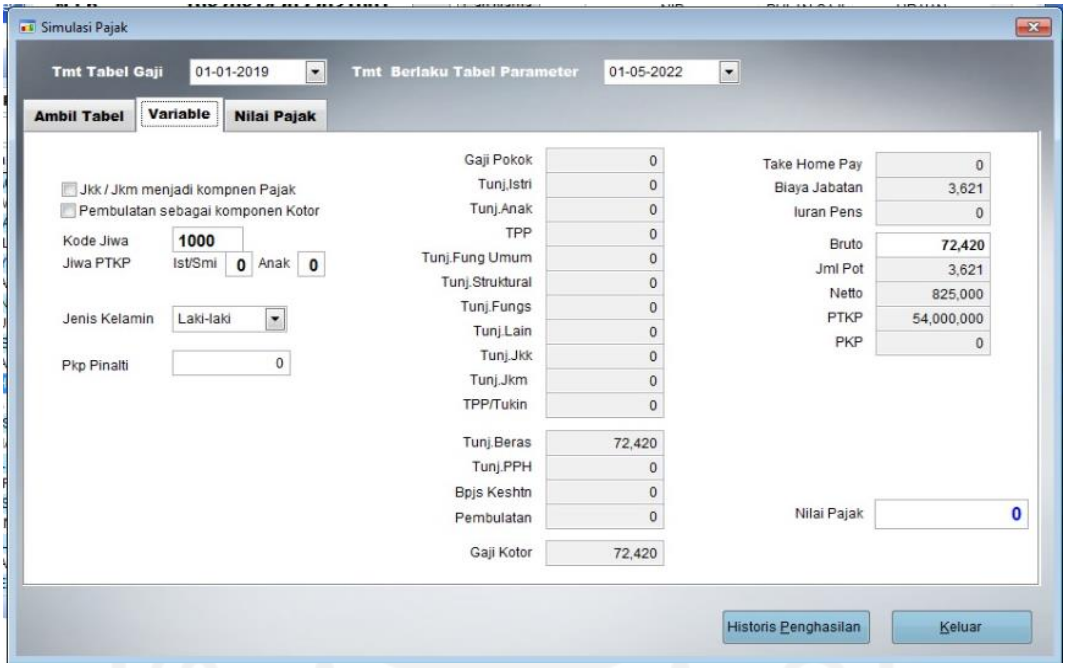

Pada gambar diatas SIMGAJI dapat digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Bruto, penghasilan Netto , jumlah potongan , PTKP dan PKP sehingga memudahkan dalam menentukan nilai pajak. Dimana dalam perhitungannya dibutuhkan kejelasan dalam besarnya gaji pokok dan tunjangan yang diterima oleh pegawai.

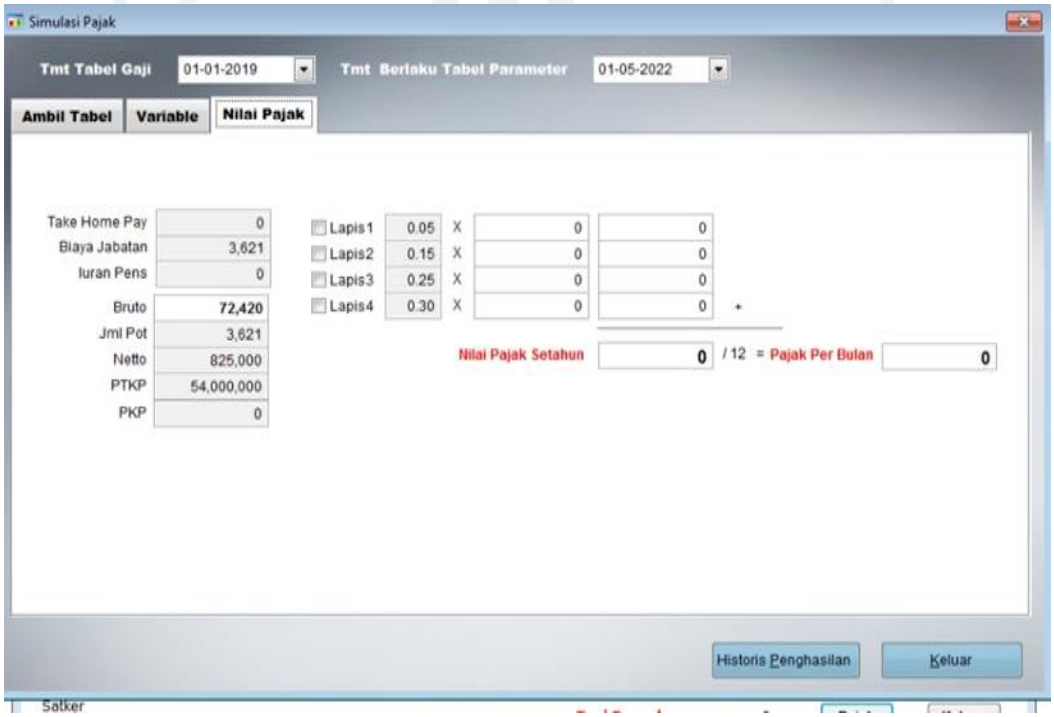

Setelah mengetahui nilai pajak maka pajak per bulan pegawai akan diketahui dengan perhitungan pada pambar diatas. Dimana PKP akan dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan golongan nya masing- masing pegawai . Adapun tarif yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Sebesar 0% dari jumlah bruto honorium atau imbalan lain bagi PNS golongan 1 dan golongan 2
- Sebesar 5% dari jumlah bruto honorium atau imbalan lain bagi PNS golongan 3
- Sebesar 15% dari jumlah bruto honorium atau imbalan lain bagi PNS golongan 4

5.2 Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai pada BPKAD Kabupaten Pati Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Prosedur yang digunakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten pati dalam mengelola pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai menggunakan aplikasi SIMGAJI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.03/2010 tentang Pemotongan dan Penyetoran pajak pengasilan pasal 21 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang prosedur pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberi kerja. Sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan BPKAD pati dapat memonitoring instansi sebagai pemberi kerja untuk melakukan pemotngan pajak penghasilan pasal 21.

Selain itu, perhitungan pajak pada SIMGAJI telah sesuai dengan Undang undang Harmonisasi Peraturan perpajakan dibuktikan dengan tarif progresif yang tertera pada simulasi perhitungan pajak pada SIMGAJI. Kemudian biaya jabatan sebesar 5% juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.03/2008.

5.3 Peran SIMGAJI untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Pati

Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dalam mengelola penggajian. Berikut adalah beberapa peran SIMGAJI dalam hal ini:

1. Membantu dalam mempermudah proses penggajian dengan cara menghitung gaji secara otomatis dan menghindari kesalahan manual. Ini memastikan akurasi dan efisiensi dalam penggajian.
2. Memastikan transparansi dan integritas data penggajian dengan memastikan bahwa data yang diterima dan disimpan adalah data yang valid dan akurat.
3. Mempermudah proses penggajian dengan memastikan bahwa data penggajian dapat diterima dan disimpan secara cepat dan mudah.
4. Mempermudah pembuatan laporan dan analisis data penggajian, memastikan bahwa laporan dan analisis dapat diterima dan disimpan secara cepat dan akurat.
5. Memastikan keamanan data penggajian dengan memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dihapus tanpa izin yang tepat.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Mekanisme yang digunakan BPKAD dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui aplikasi SIMGAJI sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji, Upah, dan Imbalan Lain yang Diterima Pegawai dan Pensiunan serta Perhitungan dan Penyetoran Pajak Terutang.
2. Melalui SIMGAJI Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai secara otomatis akan terpotong oleh system aplikasi.
3. Dengan adanya SIMGAJI memudahkan BPKAD Pati dalam mengelola penggajian di Kabupaten pati . Sebab SIMGAJI telah berkomitmen untuk berinovasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penggajian pegawai.

6.2 Saran

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pati untuk memberikan Sosialisai agar Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Pati untuk melaporkan SPT tahunan untuk meningkatkan kepatuhan mereka
2. Meningkatkan produktivitas dalam Pemeliharaan Biodata pegawai pada SIMGAJI sehingga memudahkan *system* aplikasi dalam mengelola informasi yang terstruktur.
3. Setiap pegawai PNS dan non PNS dapat mengakses SIMGAJI untuk update database dan meningkatkan pengendalian internal bagi bendahara pada setiap instansi di Kabupaten Pati

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Ajie, M. D. (1996). Pengertian Sistem Informasi Manajemen.

Arumawati, K., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-System Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Konsep Penerimaan Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(3).

Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Dinamika keuangan dan Perbankan, 3(1), 126-142.

Indonesia, K. K. R. (2009). Direktorat Jenderal Pajak. Pedoman Penagihan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang-undang No 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jakarta.

Rohiyatun, B. (2020).Manajemen Perkantoran Modern. Jurnal Visionary, 9.

Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.

Tambunan, B., & Simanjuntak, A. M. (2022). Studi kasus: Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 22(1), 103-114.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. Quanta, 2(2), 83-91.

LAMPIRAN

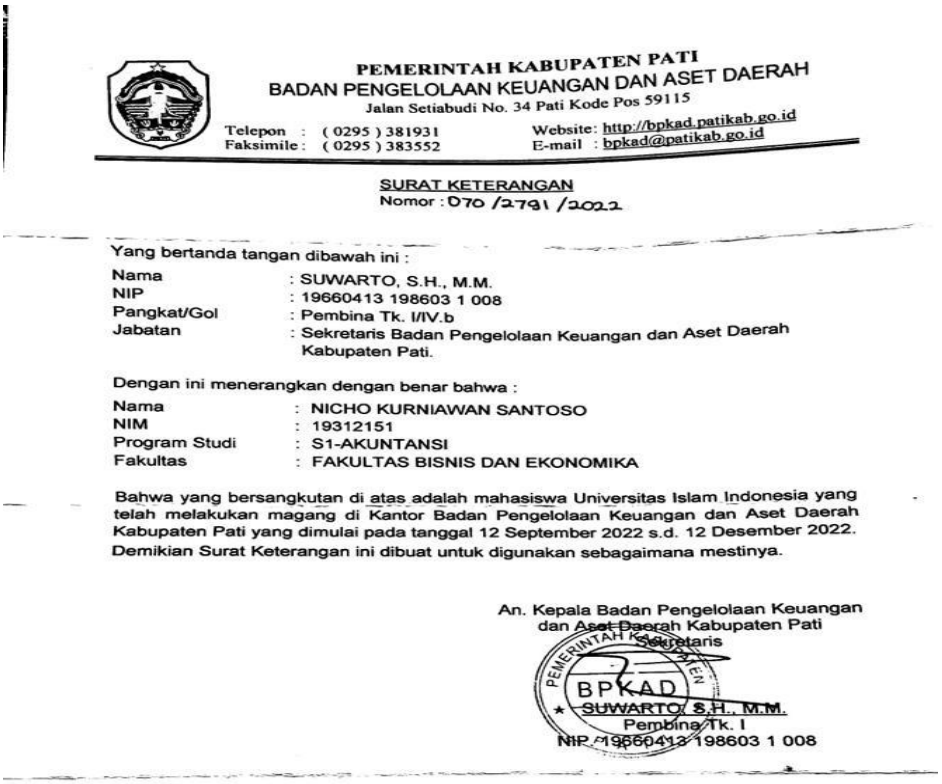

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Setiabudi No. 34 Pati Kode Pos 59115
Telepon : (0295) 381931
Faksimile : (0295) 383552
Website: http://bpkad.patikab.go.id
E-mail : bpkad@patikab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 /2791 /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUWARTO, S.H., M.M.
NIP	: 19660413 198603 1 008
Pangkat/Gol	: Pembina Tk. I/IV.b
Jabatan	: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama	: NICHO KURNIAWAN SANTOSO
NIM	: 19312151
Program Studi	: S1-AKUNTANSI
Fakultas	: FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Bahwa yang bersangkutan di atas adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati yang dimulai pada tanggal 12 September 2022 s.d. 12 Desember 2022.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pati
Sekretaris

BPKAD
SUWARTO, S.H., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19660413 198603 1 008

Lampiran 1 : Surat Keterangaan Selesai Magang

Nicho Kurniawan Santoso

ABOUT ME

Hallo! Nama saya Nicho Kurniawan Santoso, saya lahir di Blora , 8 Desember 2000. Saya kuliah di Program Studi Akuntansi , Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta , di kampus saya tertarik untuk mengikuti kompetisi game simulasi bisnis bertemakan ERP (Enterprise Resource Planning). Saya dapat bekerja di bawah tekanan , dan saya dapat bekerja di lingkungan yang beragam .

Kontak

- +62 85729838725
- nichokurniawansantoso@gmail.com
- https://www.linkedin.com/in/nicho-kurniawan-santoso-4942051ba/
- Jl. Todanan No. 2, Blora , Jawa Tengah

PENDIDIKAN

FORMAL

Universitas Islam Indonesia

Program Studi Sarjana Akuntansi , Fakultas Bisnis dan Ekonomika

2019-Now

IPK : 3,38

INFORMAL

course on Introduction to SAP S/4HANA with Global Bike Inc.

PRESTASI

MonsoonSIM ERMCompetition 2021
Juara 2 (internasional)

MonsoonSIM ERMCompetition 2021
BEST VIDEO (internasional)

MERMC Indonesian Final 2021
Juara 2 (Nasional)

Kompetisi internal Monsoonsim 2021
Juara 1

Lampiran 2 : *Curiculum Vitae* Nicho Kurniawan Santoso